**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

**DAERAH PESISIR DAN PERBATASAN**

**DI KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

***Oleh***

Irwanto \*)

NPM. 139020002

***Abstract***

*Poverty is not something that stands on its own, but realized as a result of the interaction between the various aspects that exist in people's lives, as a multidimensional problem that poverty reduction should be solved holistically from all aspects of human life, having regard to the factors pengambat implementation i.e. tractability of the problems, the ability of statute to structure implementation and Non Statutory variables affecting implementation by Mazmanian and Sabatier, this research is a research eksplanatori by using the methods of the survey. The survey is conducted to the heads of poor households recipient poverty as a member of the Karimun Regency samples in the riau Islands province. The results of research to find the causes of the ineffectiveness of the implementation of the poverty reduction policy of the coastal region and the border in the Riau Islands Province Karimun Regency quantitatively tractability of the 33.3% followed by problems of Non Statutory variables affecting implementation 32.2% and ability of statute to structure implementation 43.5% with an average of 49, 7% third indicator of the deepened and expanded note that financial resource allocation be inaccuracies the biggest issue of the ability of statute to structure implementation the implementation of poverty reduction policies of the coastal region and the border Counties Karimun, Riau Islands Province tractability of the dominant problems are due to the poverty level of the technical difficulties encountered due to economic factors and a lack of earnings as well as the Non Statutory variables affecting implementation that does not support with low public support against the policy did not play an active role helping the Government to achieve the success of improving the welfare of the poor, the existence of the phenomenon of imperfect Implementation and new dimensions of empowering people and local wisdom in the implementation of poverty reduction policies of the coastal region and the border*

***Keyword: Policy implementation and Poverty reduction***

1. **Latar Belakang Penelitian**

Dari perspektif instrumental kebijakan publik adalah alat untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah mewujudkan *public values* Pemerintah sebagai pemegang kendali pembangunan diharapkan menciptakan kebijakan publik yang unggul dengan tepat guna mencegah terjadinya masalah publik *(fungsi preventif*), mengatasi masalah publik *(fungsi kuratif*) dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (*state obligation*) dalam memenuhi [hak](http://id.wikipedia.org/wiki/Hak) warga negaranya, terutama bagi kelompok yang kurang beruntung *(disadvantage groups)* yang terjerat dalam lingkaran kemiskinan. Kemiskinan itu sendiri merupakan suatu konsep yang cair dan bersifat multidimensional, konsep cair dikarenakan kemiskinan bisa bermakna subyektif, relatif, dan sekaligus juga bermakna absolut, sedangkan disebut multidimensional karena kemiskinan itu dapat dilihat dari berbagai sisi seperti ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Formulasi kebijakan yang dianggap baik tidak selamanya berkontribusi positif bagi keberhasilan implementasi kebijakan, *bad execution* selalu menjadi sebuah kesimpulan implementasi kebijakan yang dijalankan, dalam konteks penelitian implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan hal ini sangat tidak diharapkan terlebih lagi bagi daerah pesisir dan perbatasan karena Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 menjelaskan bahwa: “kawasan perbatasan merupakan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena memiliki pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.”, sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kawasan pesisir dan perbatasan laut Negara hendaknya memberikan gambaran yang positif dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik. Melalui Surat Keputusan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor. 01 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan tahun 2011-2025 memberikan acuan bagi pengelolaan kawasan perbatasan, desain besar pengelolaan batas wilayah Negara yang memuat hal-hal umum yang berlaku bagi seluruh kawasan perbatasan di Indonesia dan menetapkan Kabupaten Karimun sebagai salah satu Kabupaten Perbatasan laut Negara Republik Indonesia dengan LOKPRI III (Lokasi Prioritas Tiga), karena wilayah Kabupaten Karimun berada di antara Kota Batam, Singapura, Malaysia, Kepulauan Riau dan Riau. Hal ini menjadikan Karimun sebagai tempat yang sangat strategis terutama untuk kegiatan perekonomian.

Guna meminimalisir isu geopolitik dan bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah Kabupaten Karimun mengimplementasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan sejalan dengan terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau guna membantu penduduk miskin Kabupaten Karimun yang berjumlah 9467 kepala keluarga dengan katagori sangat miskin 1.763 KK, Miskin 3.942 KK dan Hampir Miskin 3.942 KK yang tersebar di duabelas kecamatan dengan total anggaran yang disediakan dari tahun 2011 sampai dengan 2014 sejumlah Rp. 159,456,258,594, yang disepakati dengan 3 (tiga)

Kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan sejak tahun 2011 tidak efektif yang ditandai dengan semakin meningkatnya angka kemiskinan 5,9% tahun 2011, menjadi 6,4% tahun 2012, 6,7% pada tahun 2013, dan 6,72% pada tahun 2014. sebagaimana terlihat pada grafik 1.2. Bukan tanpa alasan beberapa penelitian sejenis menunjukan adanya permasalahan dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana Tim Peneliti Pusat Studi Sosial Asia Tenggara Pusat Studi Perdesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada,melakukan tinjauan terhadap efektifitas program pengentasan kemiskinan di Indonesia studi di lima belas Kabupaten/Kota wilayah kerja SAPA (*Strategic Alliance for Poverty Alliviation*) (2013).

Kondisi ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, hal ini terjadi di Kabupaten Karimun dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat diatas rata-rata Nasional (Grafik 1.3 ) namun angka kemiskinan juga meningkat. Studi pendahuluan dan telaah dokumen yang peneliti lakukan menunjukan bahwa kebijakan menumbuhkembangkan usaha penduduk miskin untuk meningkatkan produktivitas tidak dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga sasaran, mekanisme kebijakan melalui program bantuan kelompok usaha bersama dan simpan pinjam perempuan menimbulkan sikap ketergantungan untuk terus mendapatkan bantuan dari pemerintah, kelompok usaha hanya berstatus embrio, usaha hanya berjalan dalam rentang waktu tiga sampai dengan lima bulan hal sebagaimana Arsyad (2004), banyak negara sedang berkembang yang mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 1960-an mulai menyadari bahwa pertumbuhan semacam itu hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan. Lebih lanjut disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi gagal untuk mengurangi bahkan menghilangkan besarnya kemiskinan absolut di Negara sedang berkembang. Dengan kata lain, pertumbuhan GNP (*Gross National Product*) per kapita yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

**B. Rumusan Masalah**

* + 1. Faktor–faktor apa yang menyebabkan Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan daerah pesisir dan perbatasan di Kabupaten Karimun belum Efektif?.
		2. Bagaimana Strategi yang dapat diterapkan agar Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan daerah pesisir dan perbatasan di Kabupaten Karimun dapat Efektif?.
1. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1). Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka penelitian ini bertujuan

* + 1. Untuk mengetahui, mendiskripsikan serta menganalisis Faktor –faktor Apa yang menyebabkan Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan daerah pesisir dan perbatasan di Kabupaten Karimun belum Efektif.
		2. Untuk menentukan langkah-langkah strategis agar implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan daerah pesisir dan perbatasan di Kabupaten Karimun menjadi Efektif.

**2). Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari, sehingga selain berguna dalam mengembangkan pemahaman, penalaran dan pengalaman peneliti, juga bagi pengembangan teori ilmu pengetahuan khususnya ilmu administrasi publik.

 **3.). Manfaat Praktis**

 Secara Praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan kerangka acuan bagi peneliti, masyarakat dan pengambil kebijakan pada tingkat pusat dan daerah menyangkut kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah pesisir dan

1. **Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan studi pendahuluan dan analisis dokumen pelaksanaan diketahui bahwa program penanggulangan kemiskinan tidak dapat mencapai tujuan dan tidak efektif menurunkan angka kemiskinan, *Unsuccesfull Implementation,* Implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana namun mengingat kondisi eksternal tidak menguntungkan sehingga kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya ia memiliki resiko gagal karena faktor-faktor berikut: (1) Pelaksanaannya jelek (2) Kebijakan sendiri memang jelek (3) Kebijakan yang bernasib jelek (*bad luck*) (3) Kebijakan tidak diungkapkan secara terbuka kepada masyarakat oleh pembuat kebijakan. sehingga perlu diketahui faktor-faktor yang menyebabkannya, dalam penelitian ini peneliti menggunakan Model Mazmanian dan Sabatier (1983:22) disebut model Kerangka Analisis Implementasi (*Framework for Implementation analysis)* menjadi *Applied Theory* dalam penelitian ini karena dipandang paling lengkap dari teori implementasi kebijakan generasi ke dua, yangmengemukakan tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu : (i) Mudah Tidaknya Masalah Dikendalikan (*Trackability of the problem)*, (ii) Kemampuan Kebijakan Menstrukturkan Proses Implementasi (*Ability of statute to structure implementation)* dan (iii). Variabel Diluar Undang-Undang Yang Mempengaruhi Implementasi (*Non Statutory Variables Affecting Implementation*

**FEED**

 **BACK**

**KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

**PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

**Implementasi Kebijakan**

**“ Mazmanian dan Paul.A.Sabatier**

**(1983)**

**FEED FORWARD**

*Tractabiity of the problem,*

*ability of statute to structure implementation*

*non statury variables affecting implementation.*

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

***Efektif***

***Belum***

***Efektif***

**PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN**

**STRATEGI**

 **Gambar 2** **Kerangka Pemikiran**

**E. Metode Penelitian**

 Metode , penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian campuran (*mixed method*), sebagaimana Creswell (2014:215 ) Metode kombinasi model *sequential* adalah suatu prosedur penelitian dimana peneliti mengembangkan hasil penelitian dari satu metode dengan metode yang lain. Metode ini dikatakan *sequential*, karena penggunaan metode dikombinasikan secara berurutan. Bila urutan pertama menggunakan metode kuantitatif, dan urutan kedua menggunakan kualitatif, maka metode tersebut dinamakan kombinasi ***sequential explanatory***

 Populasi dalam penelitian ini adalah Penduduk miskin penerima bantuan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan pesisir dan perbatasan di Kabupaten Karimun yang terdiri dari Kecamatan Moro, Buru, Tebing dan Kecamatan Kundur dengan Jumlah 4800 Kepala Keluarga

1. **Hasil Penelitian**

Faktor**–**faktor yang menyebabkan Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah pesisir dan perbatasan di Kabupaten karimun belum efektif dari variabel mudah tidaknya masalah dikendalikan (*tractability of the problems*), Kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi (*ability of* ***statute to structure implementation*)** disimpulkan sebagai berikut:

**1). Mudah tidaknya masalah dikendalikan (*tractability of the problems*)**

Secara keseluruhan nilai kuantitatif variabel mudah tidaknya masalah dikendalikan (*tractability of the problems*) adalah 53,6% menunjukan; (i). Tingkat kesulitan teknis sebagai penyumbang terbesar penyebab ketidakefektifan implementasi kebijakan sejumlah 60,7%; (ii). Persentase kelompok sasaran terhadap jumlah penduduk menjadi faktor penyebab kedua yang terbesar dengan 56.6%.selanjutnya secara berurutan diikuti oleh (iii). Keberagaman prilaku dari kelompok sasaran dengan persentase 55,4% dan; (iv) Ruang lingkup perubahan prilaku yang di kehendaki sebesar 41.7%.

**2. Kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi (*ability of statute to structure implementation*)**

Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukan kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi (*ability of statute to structure implementation*) 43.5% menyebabkan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan pesisir dan perbatasan di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau menjadi tidak efektif, ketidakefektivan tersebut berdasarkan hasil penelitian kuantitatif diketahui dari indikator: (i) Ketetapan alokasi sumberdaya finansial 73.47%; (ii).Partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan 70,41%; (iii). Kejelasan dan konsisten tujuan 51.02%; (iv) Teori kausalitas yang melandasi kebijakan 43.2%; (v). Keterpaduan hirarkhi dalam dan diantara lembaga pelaksana 61.05%; (vi). Konsistensi aturan dari badan pelaksana 5.36%; (vii). Tingkat komitmen aparatur terhadap tujuan kebijakan 40,48%.

**3. Variabel diluar Undang-undang yang mempengaruhi implementasi (*Non Statutory Variables Affecting Implementation.***

 Secara keseluruhan nilai kuantitatif variabel diluar Undang-undang yang mempengaruhi implementasi (*Non Statutory Variables Affecting Implementation)* adalah 51.9% data kualitatif mendukung kuantitatif, berdasarkan data hasil penelitian penelitian menunjukan faktor penghambat yang terbesar karena kurangnya dukungan publik terhadap kebijakan (92%), diketahui bahwa masyarakat tidak memberikan bantuan bagi membantu masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan karena meyakini dana yang dialokasikan telah cukup untuk membantu masyarakat miskin, nilai kegotong-royongan sudah sulit dilaksanakan di desa dan kelurahan, hal ini karena kebiasaan gotong royong yang sudah semakin hilang dan dikarenakan persepsi masyarakat bahwa anggaran bantuan yang diberikan sudah mencukupi untuk menjalankan program yang diterima

**H. Pembahasan Hasil Penelitian.**

 Berdasarkan analisis data Kuantitatif dan Kualitatif mudah tidaknya masalah dikendalikan (*tractability of the problems*), kemampuan kebijakan menstrukturkan proses Implementasi (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel diluar Undang-Undang yang mempengaruhi Implementasi (*non statutory variables affecting implementation)* Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di daerah pesisir dan perbatasan, belum efektif dengan faktor-faktor penyebabnya sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

**1). Mudah Tidaknya Masalah Dikendalikan (*tractability of the problems*)**

Secara keseluruhan nilai kuantitatif variabel mudah tidaknya masalah dikendalikan adalah 69%, Mudah tidaknya masalah dikendalikan berdasarkan hasil penelitian kualitatif menunjukan bahwa: kesulitan teknis implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah pesisir dan perbatasan karena *faktor ekonomi dan kurangnya penghasilan* diketahui karena Inflasi, kesempatan kerja yang rendah karena rendahnya pendidikan dan keterampilan, sehingga kesempatan kerja di perusahan yang berinvenstasi di Kabupaten Karimun di isi oleh tenaga kerja lokal dari daerah lain, Kemiskinan yang menjadi warisan dan penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup layak menjadi kesulitan teknis yang membuat implementasi kebijakan penanggulang kemiskinan tidak efektif, dengan *sarana dan prasarana untuk bekerja yang tidak memadai* berdasarkan hasil peneltian bahwa alat tangkap nelayan berupa jaring yang tidak sesuai dengan kebutuhan, volumenya yang sedikit serta sampan ketinting yang tidak dapat menjangkau areal tangkap yang jauh, merupakan tingkat kesulitan teknis yang dijumpai di kalangan penduduk miskin yang bekerja sebagai nelayan tangkap, disisi lain kepemilikian lahan, dan mahalnya dukungan alat dan biaya produksi seperti pupuk,vaksin, obat hama, bibit., merupakan hasil penelitian tingkat kesulitan teknis yang dijumpai dikalangan penduduk miskin yang bekerja sebagai petani. ***Tidak mudahnya akses untuk mendapatkan modal usaha,*** modal usaha yang kecil dari pemerintah dan daftar tunggu yang banyak membuat penduduk miskin mencari alternatif pinjaman ke renternir. Hasil penelitian juga menunjukan keterampilan berusaha tidak dimiliki, dan konsumtif menjadi tingkat kesulitan teknis dari karakteristik masalah implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah pesisir dan perbatasan. ***Keberagaman perilaku kelompok sasaran*** dalam penelitian diketahui munculnya prilaku menjual alat tangkap dan bibit tanaman untuk kebutuhan mendesak menjadi prilaku yang tidak diharapkan yang dapat menjadi faktor tidak efektifnya implementasi kebijakan itu sendiri, tidak adanya sanksi dari pemberi bantuan, serta munculnya konflik antar nelayan karena harus bersama-sama memanfaatkan alat tangkap (boat penangkap ikan) yang diterima, berusaha mengganti alat tangkap sesuai kebutuhan, merupakan prilaku kelompok sasaran yang yang ditemui dalam penelitian. Selajutnya ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki hasil penelitian menunjukan bahwa bantuan modal usaha tidak dapat meningkatkan penghasilan keluarga, dan prosentase kelompok sasaran terhadap jumlah menunjukan masih banyak penduduk miskin yang belum menerima bantuan.

**.2. Kemampuan Kebijakan Menstrukturkan Proses Implementasi** (***ability of statute to structure implementation*)**

 Secara keseluruhan nilai kuantitatif variabel kemampuan kebijakan menstrukturkan proses Implementasi 76% berdasarkan data hasil penelitian kualitatif variabel kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi sebagai faktor penghambat implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah pesisir dan perbatasan bersumber dari ***ketidaktepatan alokasi sumberdaya finansial***, diketahui bahwa dana rehabilitasi RTLH (rumah tdak layak huni), Kube (kelompok usaha bersama), dan pertanian.serta beasiswa miskin tidak dialokasikan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan. ***Keterpaduan hierakhi dalam dan antar lembaga pelaksana*** diketahui monitoring untuk seluruh program penanggulangan kemiskinan tidak dilakukan secara bersama-sama oleh pemberi bantuan, dan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan diketahui masyarakat tidak memberikan dukungan bagi pelaksanaa program kemiskinan yang diterima oleh penduduk miskin. ***Tingkat komitmen aparatur terhadap aturan kebijakan*** diketahui bahwa aparatur pelaksana tidak bersedia memecahkan masalah yang dihadapi penerima bantuan, teori Kausalitas yang melandasi kebijakan, berdasarkan penelitian di ketahui kemiskinan yang terjadi karena faktor ekonomi yang membuat semua kebutuhan pangan,sandang dan papan tidak terpenuhi serta indikator konsistensi aturan badan pelaksana, diketahui penerima bantuan mentaati ketentuan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan program bantuan yang diberikan

**3. Variabel diluar Undang-Undang Yang Mempengaruhi Implementasi (*non statutory variables affecting implementation)***

 Secara keseluruhan nilai kuantitatif variabel diluar Undang-Undang yang mempengaruhi Implementasi adalah 74% hasil penelitian kualitatif variabel diluar Undang-Undang yang mempengaruhi Implementasi sebagai faktor penghambat menunjukan bahwa ***dukungan publik terhadap kebijakan***, diketahui dengan tidak baiknya dukungan masyarakat terhadap program penanggulangan kemiskinan. Disisi lain kondisi sosial ekonomi dan teknologi program bantuan dapat menumbuhkan rasa percaya diri dengan informasi yang mudah dan cepat dapat diakses, namun bantuan modal usaha Kube (kelompok usaha bersama), simpan pinjam kelompok perempuan tidak dapat meningkatkan penghasilan keluarga. Selanjutnya komitmen dan keterampilan pejabat berdasarkan penelitian diketahui bahwa pejabat pelaksana didesa/kelurahan tidak memberikan saran dan evaluasi terhadap pelaksanaan program.bantuan, namun disisi lain masyarakat penerima bantuan meyakini bahwa bantuan yang diterima berdasarkan perencanaan sesuai kreteria masyarakat.miskin sehingga mereka berhak mendapatkannya. Dukungan pejabat atasan pada variabel karakteristik kebijakan terlihat bahwa dukungan pemerintah dalam memecahkan masalah kemiskinan telah terasa manfaatnya namun sikap dan sumberdaya yang dimiliki masyarakat diketahui masyarakat tidak perduli dengan tidak memberikan bantuan bagi masyarakat miskin.

1. **Strategi yang dapat dilakukan Pemerintah untuk mengatasi permasalahan Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan daerah pesisir dan perbatasan di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau yang belum efektif**

Rekomendasi strategi yang diberikan adalah **Strategi**, **Diversifikasi** artinya Pemerintah Kabupaten Karimun dalam kondisi mantap namun menghadapi sejumlah tantangan berat sehingga diperkirakan kemiskinan akan terus meningkat bila hanya bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh karenanya pemerintah kabupaten karimun disarankan untuk segera memperbanyak ragam strategi taktis lainnya dalam menanggulangi kemiskinan bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan strategi (ST/*Strength-Treats*)

* + 1. **Meningkatkan peran penyuluh lapangan pertanian, perikanan, dan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.**

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang baik, pada umumnya mensyaratkan adanya proses pendampingan, ini menjadi penting karena objek pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat dengan dinamikanya yang beragam, fungsi pendampingan adalah untuk memfasilitasi, memotivasi masyarakat serta mengawasi agar kegiatan pemberdayaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki.

Pemberdayaan masyarakat (*community empowering*). Pemberdayaan melalui peran penuyuluh lapangan bidang pertanian, perikanan dan pembinaan usaha menengah kecil dan mikro merupakan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat miskin, karena berdasarkan hasil penelitian diketahui kurangnya penyuluhan dan pembinaan usaha menjadi penghambat bagi efektifitas penanggulangan kemiskinan daerah pesisir dan perbatasan di Kabupaten Karimun.

**b).Revolusi mental penerima manfaat penanggulangan kemiskinan bagi menumbuhkan kemandirian**

Revolusi mental masyrakat miskin diperlukan untuk meningkatkan kemandirian dan etos kerja Kemiskinan mental meliputi dimensi moral, etika, akhlak, dan mental yang kemudian memperlemah daya saing sumber daya manusia Indonesia. Mental inilah yang sebenarnya faktor dominan dalam melakukan perubahan, yang kian lama justru kian luruh. Strategi ini diperlukan dengan berbagai program yang salah satunya berupa *training, sosialisasi*  secara berkelanjutan bagi meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa untuk keluar dari lingkaran kemiskinan tidak hanya pada aspek struktural melalui peran pemerintah, kemandirian mental masyarakat sangat dibutuhkan agar dapat meningkatkan etos kerja yang tidak hanya berharap bantuan pemerintah setiap tahunnya.

**c.Melakukan *Poverty Rural Assesment/pemetaan sosial* untuk mewujudkan ketepatan sasaran (penerima manfaat dan alokasi sumberdaya finansial) bantuan kemiskinan**

Melakukan kajian untuk mewujudkan ketepatan sasaran (penerima manfaat dan alokasi sumberdaya finansial) bantuan kemiskinan. Penetapan sasaran dengan mendengarkan suara masyarakat miskin menjadi sangat di butuhkan karena beberapa indikator kemiskinan yang menjadi acuan tidak selalu diterima oleh masyarakat miskin didesa dan kelurahan di daerah pesisir dan perbatasan, ***Poverty Rural Assesment*** dapat memberikan informasi yang tepat bagi menjalankan kebijakan penanggulangan kemiskinan, bukan hanya sekadar mengalokasikan anggaran kebijakan sebagai syarat ada namun tepat sasaran dan besaran, mengingat semakin banyaknya masyarakat yang berada dalam katagori hampir miskin karena tingginya inflasi, rendahnya akses untuk mendapatkan modal usaha, sarana bekerja yang tidak memadai dan keterisoliran wilayah dan informasi.

**d).Meningkatkan koordinasi melalui penguatan kelembagaan TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ) Kecamatan, desa dan Kelurahan.**

Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) sebagai koordinator pelaksana kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana diatur dalam Permendagri 42 Tahun 2010 tentang pembentukan TKPKD Kabupaten Kota perlu terbentuk di setiap Kecamatan, Desa dan Kelurahan, hal ini diperlukan mengingat lemahnya komitmen implementator pada tingkat desa, kelurahan dan kecamatan dikarenakan tidak merasakan bagian dari TKPKD Kabupaten. SKPD sebagai pelaksana kegiatan kurang melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan, desa dan Kelurahan, selain itu kebijakan penanggulangan kemiskinan yang melibatkan banyak sektor seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan sehingga TKPKD Kecamatan Desa dan Kelurahan dirasakan perlu karena dapat mengkoordinasikan aparatur terkait seperti guru, bidan, perawat, PPL, penyuluh perikanan, pembinaan UMKM berada dalam hirarkhi koordinasi dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas.

**e).Revisi aturan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi dan peran masyarakat. Revisi kebijakan sebagai strategi memaksimalkan kekuatan bagi meminimalisir ancaman.**

Hal ini dilakukan karena berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya aturan kebijakan pemenuhan hak dasar, bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan bantuan modal usaha penduduk miskin tidak dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Lemahnya partisipasi masyarakat merupakan ancaman bagi keberhasilan kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah pesisir dan perbatasan sehingga diperlukan strategi yang dapat mengintervensi partisipasi yang akhirnya secara berkelanjutan menjadi kesadaran masyarakat untuk sama-sama membantu masyarakat miskin keluar dari lingkaran kemiskinan

**f). Menyusun Basis Data Terpadu Daerah (BDTD) *one data for all***

Menyusun Basis Data Terpadu Daerah (BDTD) *one data for all* menjadi pilihanStrategi penanggulangan kemiskinan daerah pesisir dan perbatasan di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan hasil penelitian, dan telaah dokumen perencanaan  *mistargeting*  menjadi masalah krusial nasional dan daerah, dengan keterbatasan anggaran pemerintah daerah ketepatan sasaran (penerima manfaat dan alokasi sumberdaya finansial) dapat dilakukan dengan ketersedian basis data terpadu daerah (BDTD) *one data for all)*  yang selama ini belum dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

**g). Meningkatkan Peran CSR (Corporate Social Responsibility).**

Strategi meningkatkan peran *Coperate social responcibility* di daerah pesisir dan perbatasan untuk mereduksi kemiskinan sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya *(financial)* saja. Tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple *bottom lines*. Di sini *bottom lines* lainnya selain finansial juga adalah sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan *(sustainable*). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila, perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar, di berbagai tempat dan waktu muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidupnya.

**h). Memaksimalkan kebijakan kependudukan**

Memaksimalkan kebijakan kependudukanmelalui implementasi program penurunan angka kelahiran dan mengatasi permasalahan migrasi penduduk di kabupaten karimun sebagai daerah pertumbuhan ekonomi bagi menurunkan angka kemiskinan;

**i). Pemberdayaan masyarakat hukum adat dan nelayan tradisional**;

Pemberdayaan masyarakat hukum adat dan nelayan tradisional (i) penataan investasi; (ii) sistem perizinan; dan (iii) pengelolaan kawasan konservasi laut Pemberdayaan masyarakat diperkuat dalam inisiasi penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil beserta dengan pemerintah dan dunia usaha. Dengan norma hukum ini, maka masyarakat dapat mengambil inisiatif mengusulkan rencana zonasi.

**j). Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) di bidang kelautan dan perikanan**

Memiliki peranan strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peranan strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan, sehingga memiliki kapasitas dan kompetensi yang diharapkan untuk optimalnya pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan.

**k). Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan**

Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan Dengan revitalisasi armada penangkapan ikan yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil,

**l). Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan (budidaya, penangkapan, pengolahan dan pemasaran)**

Merupakan salah satu pilar penting dalam peningkatan daya saing bangsa di era perdagangan bebas serta penerapan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Namun, kondisi kesejahteraan para nelayan dan pelaku usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dengan pendapatan yang diperolehnya masih sangat terbatas. Permasalahan yang dihadapi dalam menghadapi MEA 2015, utamanya adalah belum adanya perlindungan terhadap pelaku usaha.

I. **Temuan penelitian**

1.Keberhasilan kebijakan publik penanggulangan kemiskinan didaerah pesisir dan perbatasan melalui peningkatan sosial ekonomi dengan daya dukung alokasi sumberdaya finansial yang maksimal serta dukungan masyarakat terhadap kebijakan.

2..Munculnya dimensi baru dari *dimensi Mazmanian, Daniel A and Paul A Sabatier,* Temuan penelitian dengan teori yang digunakan dilabelkan oleh peneliti dengan “*Imitation and modify implementation of public policy in the era of regional autonomy”.* Pemberdayaan masyarakat (*empowering people*) yang merupakan dimensi lain yang ditemui dalam penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat miskin dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan untuk dapat keluar dari lingkaran kemiskinan yang terjadi didaerah pesisir dan perbatasan. Kearifan local/*local wisdom* yang berkualitas dengan memaksimalkan peran *social institusional and social networking* merupakan dimensi yang memegang peran penting bagi efektifitas implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah pesisir dan perbatasan.

5. Perbedaan indikator implementasi oleh mazmanian and sabatier yang diterapkan di Negara federal ternyata tidak relevan dan tidak menjadi urutan prioritas ketika diterapkan di Negara berkembang dengan konsep desentralisasi dalam era otonomi daerah, yang oleh peneliti dilabelkan dengan ***“*** *Factors restricting implementation of policy circles, the "Mazmanir"* ***theory of corrections*** *“Policy implementation, Mazmanian Daniel a. and Paul a. Sabatier Model.* yang merupakan koreksi atas teori Mazmanian Daniel a. and Paul a. Sabatier

6. Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah pesisir dan perbatasan di kabupaten karimun provinsi kepulauan riau tidak sempurna “ *Imperfect implementation”* kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagai aspek legal formal yang telah diformulasikan pemerintah kabupaten karimun tidak mampu menstruktur dengan baik implementasi itu sendiri ketidak sempurnaan terlihat dari ketidaktepatan mengalokasikan sumberdaya finansial. tidak sempurna meningkatkan partisipasi masyarakat ketidaksempurnaan mewujudkan keterpaduan hirarkhi dalam dan antar lembaga pelaksana, ketidak sempurnaan kejelasan dan konsistensi tujuan, ketidak sempurnaan dasar dengan teori kausalitas yang memadai dan rendahnya komitmen aparatur terhadap tujuan kebijakan.Ketidamampuan kebijakan menstruktur implementasi membuat impelementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan menjadi implementasi yang “*imperfect implementation”* karena kondisi permasalahan kemiskinan yang multidimensi dengan tingkat kesulitan teknis yang berat serta rendah dukungan publik terhadap kebijakan.

*7. Concentric Diversification Strategy* menjadi pilihan dengan memaksimalkan kekuatan (S) untuk menghadapi ancaman (T) bagi mewujudkan implementasi kebijakan menjadi efektif, dengan pilihan strategi: (i).PK (Penguatan Kelembagaan); (ii). BDTB (Basis data terpadu daerah); (iii).PP (Penyuluhan dan pembinaan; (iv). RK (Revisi Kebijakan); (v). RM (Revolusi Mental); (vi).PRA ( *Poverty Rural Assesment)*, (vii).Meningkatkan Peran CSR (Corporate social responsibility), Memaksimalkan kebijakan kependudukan melalui implementasi program penurunan angka kelahiran dan mengatasi permasalahan migrasi penduduk, Pemberdayaan masyarakat hukum adat dan nelayan tradisional; (ii) penataan investasi; (iii) sistem perizinan; dan (iv) pengelolaan kawasan konservasi laut, Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) di bidang kelautan dan perikanan, Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan revitalisasi armada penangkapan ikan, Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan (budidaya, penangkapan, pengolahan dan pemasaran) merupakan salah satu pilar penting dalam peningkatan daya saing bangsa di era perdagangan bebas serta penerapan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN).

**J. Saran-Saran**

**a). Saran Akademik**

Saran akademik dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Diperlukan penelitian yang lebih komperhensif mengenai implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah pesisir dan perbatasan dengan pendekatan multidisipliner.
2. Diperlukan penelitian lanjutan baik dengan pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif untuk pengembangan model kearifan lokal implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah pesisir dan perbatasan.

**b. Saran Praktis**

Saran praktis dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Menempatkan program kependudukan menjadi program prioritas untuk mengatasi pertumbuhan penduduk melalui kelahiran dan migrasi penduduk di kabupaten karimun bagi menurunkan angka kemiskinan.
2. Menumbuhkan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin terutama yang berada di kecamatan di luar pulau karimun karena dengan lemahnya ekonomi dan kurangnya penghasilan, meningkatkan angka pengangguran
3. Meningkatkan bantuan bagi sarana dan prasarana untuk bekerja yang tidak memadai terutama bagi masyarakat miskin dengan pekerjaan sebagai nelayan tangkap dengan meningkatkan volume alat tangkap dan kapasitas jelajah boat penangkapan ikan.
4. Memberikan bantuan khusus bagi petani. berupa pupuk, vaksin, dan obat pembasmi hama dan peralatannya.
5. Meningkatkan akses modal usaha berupa peningkatan jumlah dana pinjaman modal usaha bagi masyarakat miskin melalui peran perempuan dan sekaligus melakukan pembinaan dan pemberdayaan usaha yang dilakukan oleh mereka yang mendapatkan bantuan modal usaha tersebut.
6. Mengatur pola pemberian sanksi bagi masyarakat yang berpilaku menyimpang dalam penggunaan dana bantuan maupun alat bantuan yang diberikan sebagai bentuk dari pembinaan.
7. Meningkatkan Inservice Training bagi aparatur pelaksana ditingkat Desa dan Kelurahan, penyuluh lapangan pertanian, perikanan, kesehatan agar memiliki pengetahuan yang luas dan komitmen yang kuat dalam menjalankan kebijakan penanggulangan kemiskinan

8. Menyusun Basis Data Terpadu yang terkoordinir dengan baik dan memiliki tingkat konektivitas yang tinggi mulai dari desa, kelurahan,kecamatan dan kabupaten (TKPKD).

9. Pemerintah Kabupaten Karimun hendaknya berperan aktif dalam penyuluhan dan peningkatan SDM serta penyaluran dana, Memberdayakan pasar agar semua kebutuhan hidup yang layak dapat terbeli dan terjangkau oleh semua elemen masyarakat Aktif

**DAFTAR PUSTAKA**

Agustino, Leo. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. CV. Alfabeta.

Anderson, James E. (2014). *Public Policy Making. Eight Edition.* Chicago: Hilt, Tinehart and Winston. USA.

Anwas, Oos M. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Alfabeta*. Bandung.

Arsyad Lincolin,. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Asrinaldi, 2012, Politik Masyarakat Miskin Kota, Yogyakarta : Gava Media

Amanah, Siti dan Farmayanti, Narni. (2014). *Pemberdayaan Sosial, Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing.* Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.

Biro Pusat Statistik (BPS). (2011). *Profil Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta.

Bromley, Daniel W. (2010). *Environment and Economy: Proverty Rights and Public Policy*. Basil Blackwell, Cambridge (USA).

Bungin, Burhan. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta. Prenada Media Group.

Chambers, Robert, (1983), *Rural Develompment: Putting the Last First*, New York: Longman.

Cox, [David.](http://www.sagepub.com/authorDetails.nav?contribId=531945) (2010). *International Social Work Issues, Strategies, and Programs* *SAGE Publications Inc* Australia.

Craswell, John W. (2014). *Research Design (qualitative.quantitative and mixed method approaches, edition 4. SAGE Publication Ltd 1 olivers yard 55 City road London EC1Y 1SP United Kingdom ”*

Denhardt, J.V. & Denhardt, R.B. (2004). *The New Public Service: Serving, Not Steering.* New York: M.E. Sharpe.

Dunn, N William. (2014). *Public Policy Analysis:* An Introduction. Edisi Ke-9, Engelwood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc. A Simon & Schuster Co. Yogjakarta. Terjemahan dari Gadjah Mada University Press,

Dye, Thomas R. (1980). *Understanding Public Policy, Prentice Hall*. N.J: Englewood Cliffs.

---------------------(2012). *Understanding Public Policy.Fourtennth Edition* New Jersey: Practice Hall.

Edwards III, G.C. 1980. *Implementing Public Policy.* Washington: Congressional Quarterly Press.

Ekowati, Lilik. (2012). *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi atau Program.* Surakarta. Pustaka Cakra.

Fesler, James W. (1980). *Public Administration: Theory and Practice*. Prentice Hall UK.

Gertson, Larry.N (2010) *Public Policy Making Process and Principle, Third Edition:* Routledge 2Park Squere, NY 10017, USA

Giddens, Anthony. (1984) *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Polity Press. Cambridge, UK.

Grindle, Merilee S (ed). 1980. *Politics and Apolicy Implementation in the Third World.* New Jersey: Princetown University Press.

Goggin, Malcolm L et al. 1990. *Implementation, Theory and Practice, Scott, Foresmann and Company,* USA. Grirrdle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World. New Jersey. Princeton University Press.

Haughton, Jonathan and Khandker, Shahidur R. (2010). *Handbook on Poverty and Inequality:* *The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank 1818 H Street*. NW Washington, DC 20433.

Hill, M. & Hupe, P. (2014). *Implementing Public Policy: An introduction to the Study of Operational Governance.* London: Sage.

Haq, Mahbub Ul (1995), *Reflections on Human Development, New York*: Oxford University Press

Hupe, P. and M. Hill (2010): *Street-Level Bureaucracy and Public Accountability*. Journal Public Administration 85 (2) (270-300).

Hogwood, Brian W and Lewis A. Gunn. (2010). *Policy Analysis for the Real World*. Oxford University Press.

Ife, Jim dan Frank Tesoriero. (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Islamy, M.I. (2014). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara.* Jakarta. Bina Aksara.

Jones, Charles O. (2010). *Pengantar Kebijakan Publik* Terjemahan Ricky Istamto. Roja Grafindo Persada. Jakarta.

Fesler, James w.(1980 ) *Public Administration: Theory and Practice* California: Mayfield Publishing Company.

Kartasasmita, Ginandjar, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan.* Jakarta. CIDES.

Kartono, Kartini (2012), Psikologi Sosial Untuk Manajemen Perusahaan  dan  Industri , PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta.

Kusumastanto, T. (2010). *Ocean Policy dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah.* Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

Kuncoro, Mudrajat. (2010). *Otonomi Daerah - Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Kusnadi. (2010). *Akar Kemiskinan Nelayan*., Penerbit PT. Rineka Cipta Jakarta.

Lasswell, Harold, dan Kaplan, Abraham. (2010). *Power and Society, New Haven:* Yale University Press.

Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.b

Mas'oed, Mohtar and Ismanto, Ignasius. 1995. *Kebijaksanaan penanggulangan kemiskinan di Indonesia: Studi kasus program IDT. UGM.* Yogjakarta.

Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. (1983). *Implementation and Public Policy*. Scott Foresman and Company. USA.

Midgley, James. (2010) *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. SAGE Publication. Thousand Oaks. London. New Delhi.

Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn. (1983). *"The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework* dalam *Administration and Society 6,* 1975, London: Sage.

Mubyarto*.* 2004. *Teori Ekonomi dan Kemiskinan*, PUSTEP-UGM & Aditya Media, Yogjakarta.

Muttaqin, M. J. (2013). Metode Ensemble pada CART untuk Perbaikan Klasifikasi Kemiskinan di Kabupaten Jombang. Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya

Muttaqin,  Hidayatullah  (2010)  “Pengentasan  Kemiskinan”.  Jurnal  Ekonomi Indonesia, September 1st, 2010  in  arsid  E‐Syariah  http://jurnalekonomi.org

May, P. J. (2012): *Policy Regime Perspectives: Policies and Governing.* APPAM conference paper Baltimore, MD November 8-20. (37 pages).

Nakamura, Robert T and Frank Smallwood. (1980). *The Politics of Policy Implententation,* St. Martin Press, New York.

Nadjib, Muhammad (2013), *Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Ekonomi Kelautan, sstem pembiayaan Nelayan:LIPI Press Jakarta*

Nasikun. (2010). Kemiskinan di Indonesia Menujudalam Perangkap Kemiskinan*,* Problem, dan Strategi Pengentasannya (Bagong Suyanto, ed), Airlangga Univercity Press.

Nugroho D. Riant, (2009). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.* Jakarta: Gramedia.

---------(2014). Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang, Yogjakarta. Pustaka Pelajar.

Nugroho, Iwan, dan Dahuri, Rokhmin. (2010). Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Jakarta,LP3ES, Halaman: 180-184.

Pearce dan Robinson*. (*2010). *Manajemen Strategi*. Jakarta. Salemba Empat.

Pressman, Jefrey L and Aaron B. Widalvsky. 1973. *United States, Economic Development Administration, Manpower Policy, Public Works.* California: Oakland.

Purwanto, Agus Erwan dan Sulistyastuti Ratih Diah, (2012) *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan aplikasinya di Indonesia,*  Gava Media: Yogyakarta

Rangkuti, Freddy. (2014) *Bisnis Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Riduwan.Akdon 2010, Rumus dan Analisis Data dalam Statistika.
Penerbit : Alfabeta Bandung

Ripley,Randall B,Franklin A,Grace (2010) *Policy Implementation and Bureucracy,* Dorsey Press,USA.

Rosenbloom, David H, and Kravchuk, Roberts S. (2010). *Public Administration: Understanding Management, Politic and Law in the Public Sector.* (6thEdition). New York : McGraw-Hill.

Reza Noruzi, Mohammad(2011) *Policy Affairs and Policy Implementation Issues; How Policy Implementation Can Be Effective?: Journal of Public Administration and Governance ISSN 2161-7104 Vol. I.*

Sabatier, Paul. 1986. *Top Down and Bottom Up Approaches to Implementation* Research Journal of Public Policy 6, (Jan), h. 2l-48.

Sajogyo (1999) *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan minimum pangan,Aditya Media, Yogjakarta*

Salusu, Jonathan. 2003. Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit. Jakarta. Grasindo.

Satterthwaite, David (2010), “*Urban Poverty: Reconsidering its Scale and Nature*”, IDS Bulletin, Vol.28

Syafari,Agus (2014) *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok.* Graha Ilmu Yogyakarta

Sulistiyani, A.T. (2010). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan.* Gava Media. Yogyakarta.

# Sumodiningrat, Gunawan, (2010) , Pemberdayaan Sosial, Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesia Penerbit: Penerbit Buku Kompas: Jakarta

Subarsono. (2010). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi.* Yogjakarata: Pustaka Pelajar.

Sugiyono, (2013). Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Method).* Alfabeta: Bandung

Suharto, Edi. (2010)     *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta Aditama

Sumaryadi,I.Nyoman, 2010, Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Citra Utama: Jakarta.

Sumodiningrat, Gunawan, 2010 , *Pemberdayaan Sosial,* Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesia. Penerbit: Penerbit Buku Kompas. Jakarta

Supriyatna, Tjahya,(2010). *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*, Humaniora Utama Press, Bandung.

Suwitri,Sri.(2011).Konsep Dasar Kebijakan Publik.Universitas Diponegoro Semarang.

--------- 2011. *Jejaring Kebijakan Publik: Kerangka Baru Penyelenggaraan Pemerintahan.* Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Sutoro, Eko. (2012). Desentralisasi dan Penanggulangan Kemiskinan: Pelajaran dari Enam Daerah. LP3ES. Jakarta.

Stone, Deborah,     1997  *Policy Paradox*, *The Art of Political Decision Making*, New York, W. W. Norton & Company.

Tjiptoherijanto P (2010) *Urbanisation and urban development in Indonesia.* *The Indonesian Quarterly* XXIV (1), 6-14.

Theresia, Aprillia dkk, (2014), *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat.* Alfabeta. Bandung.

Miftah Thoha, (2014) *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Edisi Keduapuluhtiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Todaro, Michael P. Dan Stephen C. Smith.(2003), Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Jakarta: Erlangga,

-------------- (2014) *Economic Development*, 12/E, Prentice Hall •

Van Meter, D.S, and CEE. Van Horn. (2012). *The Policy Implementasi Process : A ConceptualFramework.* Administration and Society.

Wahab, Solichin Abdul. (2012). *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara.* Jakarta Bumi Aksara.

Wamsley, G.L. & Wolf, J.F. (ed.) (1996).*Refounding democratic public administration*: modern paradoxes, postmodern challenges. (Thousand Oaks, California: Sage Publications.]

Wheelen Thomas L,Hunger J. David (2011) *Strategic Management and Business Policy Toward Global Sustainability (13th Edition)* South-Western College Publishing

[Winarno](http://www.goodreads.com/author/show/3019757.Budi_Winarno),Budi (2012) Kebijakan Publik : Teori dan Proses Penerbit Media Pressindo, Jogjakarta.

**Perundang-undangan:**

Peraturan Pemerintah P Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN}

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan No. 1 tahun 2011 mengenai Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan tahun 2011-2025.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.32/MEN/2010 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan

Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau

Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di Provinsi Kepulauan Riau

\*) *Mahasiswa Program Doktor Ilmu Sosial*

 *Bidang Kajian Utama Ilmu*

 *Administrasi Publik Universitas*

*PASUNDAN BANDUNG*